

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak orde baru dibawah pimpinan Soeharto tidak lagi berada pada puncak kekuasaannya, banyak pengamat politik menilai bahwa Indonesia kini tengah memasuki era baru dalam sistem perpolitikan nasional. Yakni terjadinya penerapan sistem demokrasi yang menggantikan sistem sebelumnya yang banyak dituding sebagai sistem yang bersifat otoriter, meskipun sistem yang sebelumnya berlaku juga berlabel demokrasi dalam hal ini demokrasi pancasila. Perubahan sistem tersebut dimaksudkan untuk kembali mencari format baru guna mewujudkan cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Namun perubahan tersebut tentunya tidaklah serta merta berjalan dengan mulus, berbagai kendala masih sering dijumpai dalam pelaksanaannya baik yang sifatnya sosial ataupun kultural serta hambatan-hambatan yang lainnya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap implementasi otonomi daerah. Tak terkecuali masyarakat ditingkat desa, memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sebab, masyarakat desa sangat sadar keberadaan institusi-institusi demokrasi desa selama ini berada dalam kondisi yang tidak kondusif

Indria Septian Kusnaeni, 2014

*Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam mendorong menegakkan demokrasi pada level akar rumput (masyarakat pedesaan).

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejah ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai tahap perencanaan pengambilan keputusan. (<http://www.jurnal.kopertis.org>)

Pembangunan politik melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Pembangunan politik sebagai suatu bagian dari pembangunan secara menyeluruh, mempunyai beberapa karakteristik. Salah satu karakteristik dari pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan partisipasi warga negara

dalam beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah (*konvensional*) sampai bentuk yang tidak resmi (*in konvensional*).

Muhaimin (1985: 9) menyatakan bahwa:

Pembangunan politik merupakan suatu proses melalui masyarakat-masyarakat yang hanya bentuknya saja merupakan negara-bangsa, atau hanya dalam pengakuan internasional, menjadi negara-bangsa dalam arti yang sebenarnya. Jelasnya, hal ini melibatkan pembinaan kapasitas untuk mempertahankan suatu tingkat ketertiban umum tertentu, untuk memobilisir sumber-sumber dalam usaha bersama, dan untuk membuat dan menopang ikatan-ikatan internasional.

Muhaimin menyimpulkan tiga tema besar yang berhubungan dengan makna pembangunan politik. Pertama, terjadinya pertambahan persamaan (*equality*) antara individu dalam kaitannya dengan sistem politik, kedua pertambahan kemampuan (*capacity*) dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan yang ketiga pertambahan perbedaan (*differentiation and spesialitation*) lembaga dan struktur didalam sistem politik tersebut

Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan sehingga evaluasi. Proses ini tidak semata didominasi oleh elite-elite desa (Pamong Desa, BPD, Pengurus RT maupun Pemuka Masyarakat), melainkan juga melibatkan unsur-unsur lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, buruh dan sebagainya. Dari sisi proses, keterlibatan masyarakat biasa bukan dalam konteks mendukung kebijakan desa

atau sekedar menerima sosialisasi kebijakan desa, melainkan ikut menentukan kebijakan desa sejak awal.

Keberadaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Partisipasi politik dalam pembangunan desa, misalnya, bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan, antara lain melalui forum RT, Musbangdus, Musbangdes maupun Rembuk Desa. Forum-forum itu juga bisa digunakan bagi pemerintah desa untuk mengelola akuntabilitas dan transparansi, sementara bagi masyarakat bisa digunakan untuk *voice*, akses dan kontrol terhadap pemerintah desa.

Partisipasi tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan usaha-usaha untuk menumbuhkannya dengan kemampuan, ketekunan dan waktu. Berlangsungnya partisipasi masyarakat merupakan kegiatan antara dua pihak, yakni pihak yang dibangkitkan untuk berpartisipasi yaitu masyarakat dan pihak yang membangkitkan yaitu pemerintah sehingga bukan kegiatan yang sepihak saja. Dalam kaitannya dengan pembangunan desa, pihak yang memegang peranan dalam membangkitkan partisipasi masyarakat adalah pemerintah desa.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tamrin (2008), disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif antara partisipasi masyarakat

terhadap Pembangunan Politik Masyarakat di Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya penelitian tentang partisipasi dilakukan pula oleh Lestari (2012) yang menemukan hasil bahwa faktor yang mengakibatkan warga kurang aktif untuk berpartisipasi politik khususnya dalam perumusan peraturan desa adalah kurang maksimalnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyalur aspirasi warga dan minimnya pengetahuan warga tentang peran dan fungsi BPD.

Desa Rancajawat di Kabupaten Indramayu, merupakan salah satu desa yang telah berupaya menempatkan partisipasi politik masyarakat sebagai pihak utama dalam pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan peran aktif dari masyarakat merupakan fenomena baru bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya dari pemerintah desa untuk mengajak dan memotivasi masyarakat Desa Rancajawat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Untuk tercapainya partisipasi aktif dari masyarakat agar terciptanya kemajuan dalam pembangunan desa, maka diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap Desa Rancajawat ditemukan bahwa masyarakat masih kurang peduli terhadap kegiatan pembangunan di desa.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa anggota masyarakat. Mereka menyatakan bahwa apapun yang menjadi kebijakan

desa asal tidak merugikan masyarakat. Menurut mereka berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi kepada pembangunan desa dianggap merepotkan. Mereka menganggap hal tersebut menyita waktu karena ada kegiatan lain yang lebih penting untuk mereka yaitu bekerja untuk kelangsungan hidup keluarganya.

Pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 11 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD sendiri berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dengan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hal tersebut,seharusnya masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa karena telah dijamin oleh negara. Pemerintahan Desa dapat mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa dalam bidang politik, salah satunya adalah dengan menyalurkan aspirasi melalui BPD. Penelitian ini berjudul **“Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pembangunan Politik di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana pembangunan politik di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu?
3. Seberapa besar hubungan partisipasi masyarakat dengan pembangunan politik di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan politik masyarakat di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui gambaran partisipasi masyarakat di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
2. Mengetahui gambaran Pembangunan Politik di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
3. Mengetahui hubungan partisipasi masyarakat dengan Pembangunan Politik di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakatnya.

1.4.2 Secara Praktis

1. Penulis

Dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengalaman berpikir tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintah Desa

Indria Septian Kusnaeni, 2014

Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah desa sebagai tambahan informasi untuk dijadikan bahan kajian terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman untuk memanfaatkan keberadaan pemerintah desa sebagai media partisipasi politik.

1.5 Tinjauan Teori

1.5.1 Desa

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan. Badan tersebut berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

1.5.2 Pemerintahan Desa

Indria Septian Kusnaeni, 2014

Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara umum menurut Sumaryadi (2010:16), pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Menurut Sapari (1993:151) Lembaga pemerintahan adalah lembaga yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum, urusan peradilan dan pemeliharaan perasaan tenteram, perlindungan kelompok masyarakat terhadap kelompok lain. Wujud lembaga pemerintahan desa, bermacam-macam, ada yang ditangani oleh pimpinan dan keluarganya seperti golongan keluarga, marga atau berupa organisasi modern.

1.5.3 Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama (Sumaryadi: 2010:46).

Ramlan Surbakti (1992: 140-141) mengemukakan bahwa “partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya”.

Sedangkan pengertian masyarakat menurut Maclver, (dalam Budiardjo, 2008: 46), masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*society means a system of ordered relations*). Kesatuan hidup manusia yang

berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Milbrath dan Goel (1977) dalam Surbakti (1992:143) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori:

1. Apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator. Artinya, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivitas partai dan pekerja kampanye, dan aktivitas masyarakat.
4. Pengritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, Mubyarto (1984:36) menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut.

1. Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha.
2. Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
4. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun desanya dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain.
5. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.

Dengan demikian, konsep partisipasi dalam pembangunan memiliki perspektif yang sangat luas. Seseorang dikatakan telah berpartisipasi apabila dia telah terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan baik secara fisik maupun mental. Keterlibatan individu dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kontribusi.

Tingkat partisipasi yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat, dan martabat masyarakat secara maksimal.

1.5.4 Pembangunan Politik

Pembangunan politik menurut Amir Machmud (1986:5) adalah pembaharuan struktur dan kultur kehidupan politik, diharapkan akan terwujud tata kehidupan politik Pancasila yang mampu membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah tercapainya cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Definisi pembangunan politik menurut Muhaimin (1985:5-10) mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri.
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik
4. Pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa

Indria Septian Kusnaeni, 2014

Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum.
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.
7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.
9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan.
10. Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multidimensi.

Masih ada tafsiran-tafsiran lain mengenai dengan pembangunan politik, misalnya pandangan yang umum dibanyak wilayah bekas jajahan bahwa pembangunan berarti membangkitkan rasa harga diri dan kebanggaan nasional dalam hubungan internasional, atau padangan yang lebih umum di negara-negara maju bahwa pembangunan politik harus mengarah pada jaman purna-nasionalisme (*post- nationalism*) dimana negara bukan lagi merupakan unit utama kehidupan politik.

1.6 Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari sudut penelitian.

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya suatu definisi operasional agar tercipta persepsi yang sama dengan peneliti. Definisi operasional yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Indria Septian Kusnaeni, 2014
Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tentang tujuan Otonomi Desa, baik Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah menjelaskan salah satu tujuan dari implementasi otonomi desa tersebut adalah: “Otonomi Desa dapat menjadi wahana yang baik bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, melalui implementasi otonomi desa, diharapkan prakarsa dari pembangunan tumbuh dan berkembang dari aspirasi masyarakat desa, sehingga masyarakat desa akan memiliki *sense of belonging* dari setiap derap dan hasil pembangunan di desanya”.

2. Pembangunan Politik Masyarakat

Pembangunan politik mulai merupakan tantangan yang riil bagi bangsa Indonesia semenjak dibentuknya negara Republik Indonesia. Dengan pembangunan politik ini menurut Amir machmud (1982:5) adalah pembaharuan struktur dan kultur kehidupan politik, diharapkan akan terwujud tata kehidupan politik Pancasila yang mampu membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah tercapainya cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

1.7 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dengan indikatornya sebagai berikut:

Dimensi partisipasi masyarakat ini didasarkan teori dari Ndraha (dalam Sumaryadi 2010: 54-57) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Dimensi Partisipasi Masyarakat

| Variabel X 1 | No. | Dimensi | Indikator |
|------------------------|-----|----------------------------|---|
| Partisipasi Masyarakat | 1. | Perencanaan | - Kehadiran - Pemikiran - Waktu |
| | 2. | Pelaksanaan | - Mengerahkan daya dan dana - Administrasi dan dana - Penjabaran ke dalam program |
| | 3. | Menerima Hasil Pembangunan | - Menerima hasil pembangunan sebagai pemilik sendiri atau bersama - Menggunakan setiap hasil pembangunan - Mengusahakan dan merawat - Merawat secara rutin - Mengatur penggunaannya - Mengembangkannya secara bersama. |
| | 4. | Penilaian (Evaluasi) | - Penilaian Keluaran pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik |

2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Pembangunan Politik Masyarakat dengan indikatornya sebagai berikut:

Dimensi pembangunan politik masyarakat ini didasarkan teori dari Muhaimin (1982: 16) sebagai berikut:

Tabel 1.2
Dimensi Pembangunan Politik

| No. | Dimensi | Indikator |
|-----|-------------------------------|---|
| 1. | Persamaan (<i>equality</i>) | <ul style="list-style-type: none"> – Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. – Persamaan hak dan kewajiban masyarakat dalam sistem politik. – Persamaan peluang dan kesempatan masyarakat dalam menduduki jabatan politik, dsb. |
| 2. | Kapasitas | <ul style="list-style-type: none"> – Output penerapan suatu sistem kebijakan. – Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pemerintah. – Rasionalitas administrasi |
| 3. | Diferensiasi dan spesialisasi | <ul style="list-style-type: none"> – Spesialisasi struktur – Spesialisasi fungsional |

1.8 Hipotesis

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2012: 64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui

Indria Septian Kusnaeni, 2014

Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan konsep dan teori sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis akan mengemukakan hipotesis penelitian yakni:

Ho: Partisipasi masyarakat tidak mempunyai hubungan yang positif terhadap pembangunan politik masyarakat.

Ha: Partisipasi masyarakat mempunyai hubungan yang positif terhadap pembangunan politik masyarakat.